

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi sehingga menjalankan sistem pemilu ataupun pemilihan secara langsung dimana melibatkan seluruh elemen masyarakat baik dari rakyat kecil sampai rakyat elit. Semuanya memiliki hak setara di bawah asas demokrasi yang mengandung prinsip LUBER JURDIL (Undang-undang Dasar, 1945). Pemilu ini merupakan hasil dari kesepakatan bersama yang menempatkan suara rakyat sebagai gerbong utama untuk menjalankan roda pemerintahan yang lebih baik. Dalam perkembangan pemilu telah mengalami berbagai macam perubahan aturan maupun prosedur di dalamnya yang semata mata di maksudkan untuk perbaikan sistem yang berjalan. Perbaikan sistem tersebut tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan yang tidak jarang menimbulkan suatu permasalahan ataupun ketidaksesuaian dengan kondisi yang ada di seluruh daerah.

Lebih lanjut mengacu pada definisi secara umum bahwa pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Hubungan antara warga negara dan negara meskipun masih berjarak namun dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional baik pembangunan politik maupun bidang-bidang lainnya. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi (Bachtiar, 2014). Sejarah pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1955, yang telah melahirkan banyak masa kepemimpinan dengan berbagai gaya dan bentuk serta melahirkan berbagai kemunculan partai politik. Tidak jarang di masa ini secara tidak langsung telah muncul suatau efek persaingan antara para elit politik yang

terkadang memanfaatkan masyarakat untuk meraih kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan golongan.

Salah satu permasalahan yang telah menjadi rahasia umum dan sudah menjalar di seluruh daerah adalah praktik *money politic* (praktik politik uang). Di masa ini praktik money politik telah berkembang dalam berbagai wujud dan siasat yang terkadang terkesan seolah-olah tidak terjadi apa apa. Maksudnya adalah, praktik yang dilakukan tidak hanya berbentuk uang tetapi juga berbentuk wujud lainnya seperti : pemberian sembako, pemberian kontrak politik dan sebagainya. Dengan adanya praktik money politik demokrasi ini jadi tercederai karena praktik money politik ini suatu tindakan yang curang demi mendapatkan suara dengan cara memberi uang atau barang sebagai ganti suara yang di pilih. Money politik tidak bisa lepas dari sistem demokrasi, dulu money politik sudah ada tapi tidak terang terangan seperti sekarang, kalau sekarang money politik bukan lagi suatu rahasia tetapi sudah menjadi rahasia umum yang sudah diketahui oleh semua orang, bahkan kebanyakan orang juga melakukan praktik money dan bisa di bilang sudah menjadi sebuah kebiasaan menjelang pemilu. Maka dari itu demokrasi ini sudah cidera akut karna adanya money politik.

Di Ponorogo praktik money politik juga gencar terjadi dalam beberapa kasus yang sudah terbukti melalui pemberitaan media-media lokal. Hal ini menyebabkan terjadinya gelombang opini masyarakat Ponorogo yang berspekulasi terhadap kejadian ini melalui komentar-komentar baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Faktanya informasi yang tersebar melalui media dapat di katakan memiliki nilai kepercayaan tersendiri di mata masyarakat, karena tidak hanya satu melainkan ada banyak. Maksudnya adalah banyak media yang telah melakukan investigasi secara langsung dan di sisi lain, media juga memiliki kode etik tersendiri yang tidak boleh secara sembarangan menayangkan sebuah berita. Selain itu secara tidak langsung masyarakat juga turut antusias dalam merespon fenomena money politik yang terjadi di Ponorogo dalam pemilu 2019 kemarin. Bagaimana pun juga money politik adalah suatu tindakan yang menyalahi sebuah aturan yang ada dan berlaku secara sah di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam

(Undang-undang No. 7 Tahun 2017) pasal 284 yang secara garis besar memberikan gambaran bagi praktik money politik yang mana hal ini mengikat kepada seluruh masyarakat baik yang penerima maupun pelakunya dalam berbagai bentuk yang di ancam dengan suatu sanksi. Dalam pasal lain seperti (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016) tentang pilkada mengatakan bahwa penerima maupun pemberi dapat dijerat hukuman pidana berupa penjara. Maka dari itu penelitian ini berusaha untuk memfokuskan praktik money politik dalam pemilu di Ponorogo.

Penelitian terdahulu yang revalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Fitriani, Lina dkk (2019) yang berjudul “fenomena Politik Uang (money Politic) pada pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui fenomena politik uang yang terjadi di masyarakat, sangat sulit untuk dihentikan dan justru menjadi kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh calon atau kontestan politik tertentu kepada masyarakat menjelang pelaksanaan pemilu untuk mendapat dukungan dan peroleh suara terbanyak dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan analisis paradig perilaku social dengan teori pertukaran untuk menggali fenomena politik uang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Informan dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat, tim sukses dari calon legislatif. Hasil dari penelitian ini adalah factor penyebab terjadinya politik uang adalah pengaruh keterbatasan ekonomi masyarakat, rendahnya kualitas pendidikan, dan lemahnya pengawasan. Proses politik uang dilakukan secara tidak langsung yang dapat berdampak pada rusaknya tatanan demokrasi dan dapat menimbulkan masalah baru dalam masyarakat hingga pemerintah.

Penelitian relavan yang kedua dilakukan oleh Candra. M, Ghafur Jamaludin (2020) yang berjudul “Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Pilitics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normative yuridis yaitu penelitian

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah munculnya praktik politik uang dalam pemilu yaitu Patron-Klien, factor kemiskinan, rendahnya Party-Id. Peranan yang diambil oleh hukum dalam mencegah praktik politik uang adalah diperlukan adanya kebijakan untuk membebaskan sanksi pidana hanya bagi pemberi money politik dan mengubah sistem pemilu legislative dari proposional menjadi sistem distrik.

Penelitian relevan yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Putri, Magda dkk (2020) yang berjudul “Politik dan Tradisi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan rasional masyarakat Desa Kedungjati mengenai penerimaan politik uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi dan wawancara. Subjek penelitian adalah masyarakat Desa kedungjati yang menerima politik uang saat pemilihan kepala desa kedungjati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan masyarakat Desa Kedungjati akan datang ke TPS dengan membawa uang saku atau uang pemberian calon. Politik uang diterima karena anggapan bahwa menolak rejeki bukanlah hal baik. Masyarakat telah mengetahui motif dan tujuan dari calon, namun masyarakat telah memiliki kriteria calon sendiri tanpa paksaan dari politik uang.

Penelitian relevan yang keempat dilakukan oleh Lukmajati, Dendy (2016). Penelitian ini berjudul “Praktik Politik Uang dalam pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik, yaitu membuat analisis terhadap gambaran mengenai data, informasi, kejadian secara sistematis, faktual dan akurat. Penelitian ini menggambarkan mengenai praktek politik uang yang terjadi di kabupaten Blora selama penyelenggaraan pemilu 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik uang merupakan praktek illegal dalam pemilu, namun seolah-olah mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang kuat. Pelaksanaannya terselubung. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat Blora. Model politik uang yang digunakan

selama pemilu 2014 dalam bentuk pemberian sembako, souvenir dan dana hibah kepada masyarakat.

Penelitian relevan selanjutnya dilakukan oleh Yolanda, R, Hasan, E (2017). Penelitian ini berjudul “Upaya dan Kendala Panwaslih Kabupaten Bireuen Mengungkapkan Kasus *Money Politic* pada Pilkada tahun 2017 di Kabupaten Bireuen”. Penelitian ini membahas praktik politik uang yang diungkap oleh panwaslih kabupaten Bireuen berdasarkan laporan Zulfikar Muhammad. Pelaku money politik dilakukan oleh Rini Yati Bin Hamzah. Hasil penelitian menunjukkan pihak panwaslih Bireuen telah melakukan upaya dalam mengungkap kasus politik uang, diantaranya: 1) upaya dilakukan dalam mengungkap kasus money politic yaitu pertama, bersinergi dengan lembaga pemantau dan melakukan sosialisasi secara menyeluruh untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan yang partisipatif. Kedua meningkatkan pengawasan berupa penecgahan. Ketiga melaksanakan Bimtek untuk peningkatan SDM panwaslih. 2) kendalam panwaslih yaitu kendala yang bersifat procedural, minimnya anggaran serta kualitas SDM, panwaslih tidak bisa membangun jaringan kuat.

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini adalah membahas money politik yang terjadi di salah satu daerah di Indonesia. Praktik money politik tidak hanya terjadi dalam pemilu legislatif saja, namun money politik juga terjadi pada pemilihan kepala desa. Perbedaan penelitian sebelumnya yang relevan tersebut dengan penelitian ini adalah objek penelitian, tujuan penelitian. Objek dalam penelitian ini studi kasus di Desa Plalangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk money politik yang terjadi di Desa Plalangan, strategi money politik yang digunakan dan factor yang mempengaruhi terjadinya money politik di Desa Plalangan. Selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang relevan adalah teknik pengumpulan data yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi kepada masyarakat Desa Plalangan.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana bentuk-bentuk praktik money politik yang terjadi di Ponorogo dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 ?
2. Bagaimana strategi *money* politik yang dilakukan?
3. Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya *money* politik?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk praktik money politik yang terjadi dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 di Ponorogo
2. Untuk mengetahui strategi *money* politik
3. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi terjadinya *money* politik

## D. Manfaat Penelitian

### a. Peneliti

Bagi peneliti untuk menambah wawasan, pengetahuan dan untuk memenuhi tugas akhir

### b. Lembaga

Di harapkan dengan adanya penelitian ini bisa bermanfaat untuk Universitas Muhamadiyah Ponorogo sebagai bahan referensi untuk kedepannya dan sebagai bahan kajian untuk mahasiswa yang ingin mengambil tema tentang money politik

### c. Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini masyarakat bisa mengetahui semua kecurangan yang ada pada saat pemilu, jadi masyarakat bisa lebih hati hati saat menghadapi pemilu. Bisa memberi masukan kepada pemerintahan untuk mengurangi money politik.

## E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dan memahami konsep dalam penelitian ini akan di jelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

### 1. Praktik

Praktik adalah latihan pelaksanaan sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan, terapan. (Darmawan, 2013)

### 2. Money politik

Terjemahan *money politic* dalam bahasa Indonesia adalah politik uang. Dalam bahasa Indonesia, politik uang disebut suap. Istilah lain dari suap adalah uang sogok. Uang sogok berarti sejumlah uang yang diberikan kepada petugas tertentu untuk menyogok agar sebuah urusan dapat berjalan dengan lancar. (Mashudi Umar, 2015)

### 3. Pemilihan Umum (pemilu)

Pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Paling tidak ada tiga macam tujuan pemilihan umum, yaitu memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam rangka melaksanakan hak asasi warga Negara. (Morissan, 2005)

### 4. Demokrasi

Menurut Poerwodarminto (dalam Rochmadi, 2012 : 25) demokrasi merupakan istilah politik, secara harfiah berarti pemerintahan rakyat, (bentuk) pemerintahan negara yang segenap rakyat serta pemerintahan dengan perantara wakil-wakilnya. Demokrasi yang dihayati oleh masyarakat Indonesia bukanlah tiruan demokrasi bangsa lain, melainkan lahir dari nilai-nilai luhur budaya Indonesia itu sendiri. (Rochmadi, 2012)

### 5. Cedera akut

Cedera akut adalah cedera yang terjadi tiba-tiba dan biasanya dikaitkan dengan trauma, seperti tulang retak, otot sobek, atau memar. Hal ini dapat terjadi akibat terjatuh atau bertabrakan dengan pemain lain saat berolahraga. Keterkaitannya dengan demokrasi saat ini di karena

dengan adanya money politik demokrasi saat ini bisa di katakan cedera. (Hong, 2017)

## F. Landasan Teori

### 1. Pengertian Money Politik

*Money* politik dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. (Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994) Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/ kebijakan/ keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/ kelompok/ partai.

Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. (Kumolo, 2015)

Politik Uang (*Money Politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara. (Ismawan, 1999)

Maka politik uang adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu.

Dengan demikian *money* politik adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan



menggunakan uang atau barang. Politik uang umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum.

## 2. Bentuk-Bentuk *Money* Politik

Berikut akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk *money* politik, sebagai berikut: (Umam, 2006)

### a. Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang. (Heru, 2001). Dalam pemilihan Presiden, uang sangat berperan penting. Modus *Money* politik yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:

- a) Sarana Kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.
- b) Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan *money* politik misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu. (Sumartini, 2004) Bantuan Langsung (*Sembako Politik*) yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut

dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya. Contoh nyata dari Sembako Politik adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, berupa: beras, mie, minyak, gula ataupun bahan-bahan sembako lainnya. Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah.

b. Berbentuk fasilitas umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “*jariyah politis*” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan *Jariyah Politis*, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk dari bentuk *money* politik penelitian ini adalah berupa uang dengan nominal tertentu dan berupa barang seperti sembako, dalam bentuk lain bisa juga berupa perbaikan terhadap fasilitas umum, seperti Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.

### 3. Strategi *Money* Politik

Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi-strategi *money* politik, sebagai berikut: (Irawan, 2015)

a. Serangan fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar

umumnya menysar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

b. Mobilisasi massa

Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak. Dalam hal inilah biasanya terjadi fenomena pembelian pengaruh, dengan instrumen para tokoh masyarakat yang dijadikan *vote getter* untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesanan kandidat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat saat ini mau mengikuti kampanye dengan cuma-cuma. Sebagian masyarakat meminta uang makan dan bayaran untuk mengikuti kampanye akbar dan sebagainya. Bahwasanya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 yaitu dalam hal pelaksana kampanye tidak diperkenankan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam hal ini, baik strategi melalui serangan fajar ataupun mobilisasi massa yang dilakukan oleh para tim kampanye untuk menarik simpati para pemilih bisa diberikan sebelum masa kampanye, saat masa kampanye, pada masa tenang, ataupun malam hari menjelang esoknya datang ke TPS serta bisa juga dengan cara meramaikan kampanye akbar berupa jalan sehat, panggung hiburan, patrol, dll

#### 4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Money Politik*

Jika dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang, antara lain: (Amarru Muftie Holish, 2018)

a. Kemiskinan

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. *Money politik* pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah. Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Masyarakat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan 'ditarik' kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

c. Budaya

Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si pemberi yang memberi uang.

#### **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional menurut Juliansyah Noor yaitu bagian yang mendefinisikan sebuah konsep atau variable agar dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi (indikator) dari suatu konsep atau variable. Indikator dapat berupa perilaku, aspek, atau sifat. (Juliansyah, 2011)

1. Bentuk money politik dalam pemilu legislatif tahun 2019 di ukur dari :

a. Pemberian uang /barang

Dalam masyarakat saat ini uang dan barang adalah cara paling tepat untuk membeli suara mereka. Uang merupakan faktor penting untuk mendorong masyarakat agar memilih mereka karena uang adalah segalanya, begitupun juga barang, masyarakat pasti akan sangat senang jika mereka di beri barang barang kebutuhan mereka seperti beras, mie, minyak, gula dll.

b. Pemberian janji-janji atau pemberian fasilitas umum

Pemberian janji-janji atau fasilitas umum merupakan cara lainnya untuk meraih suara masyarakat demi endapatkan suara terbanyak dan demi mendapatkan kursi pada pemilu legislatif 2019, pemberian fasilitas umum juga sebagai alat untuk pencitraan kepada masyarakat.

2. Kriteria money politik

Di dalam money politik pemberian suap ada beberapa tingkatan :

a. Ringan

Di tingkat ringan ini pemberi suap memberikan bahan-bahan pokok seperti gula, beras, minyak, kopi dan bahan-bahan sembako lainnya. Kenapa bahan sembako ini di golongkan di kriteria ringan karena sembako sudah menjadi bahan pokok untuk semua masyarakat.

b. Sedang

Yang di golongkan sedang ini adalah uang, pemberi suap memberikan sejumlah uang sebagai ganti suara mereka pada saat pemilihan umum,

c. Berat

Di tingkatan berat ini adalah tingkatan yang paling berat di penuhi bagi penyuap karena besarnya nilai untuk bisa mendapatkan suara mereka, karena sebelum pemilihan pasti ada negosiasi, si penyuap biasanya menjanjikan sebuah proyek pembangunan jalan atau bangunan tetapi syaratnya mereka yang berada di daerah tersebut harus memberikan semua suara mereka kepada si penyuap tersebut.

3. Strategi money politik yang dijalankan diukur dari:

a. Serangan fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

b. Mobilisasi massa

Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta

uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak



4. Faktor yang mempengaruhi terjadinya *money* politik diukur dari:

a. Kemiskinan

Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. *Money politic* pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Masyarakat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam Metodologi penelitian sangatlah penting dalam penelitian ilmiah supaya hasil penelitiannya bisa tersusun dengan sistematis dan benar. Metode penelitian Kualitatif yang di kutip dalam buku Noor Juliansyah menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami dengan jenis penelitian deskriptif. (Budi, 2002) yaitu penelitian yang berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. (Juliansyah, 2011)

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Ponorogo dengan mengambil sampel penelitian khususnya pemilih yaitu di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.



### 3. Penentuan Informan

Informan dalam penelitian Kualitatif adalah orang yang memberikan informasi terhadap hal-hal yang di teliti. (Fatchan, 2011). Informan di tentukan atas keterlibatan yang bersangkutan terhadap situasi atau kondisi sosial yang akan di kaji dalam sebuah penelitian. Selain itu, menurut Spradley yang di kutip pada buku Moeleng J, Kriteria informan adalah sebagai berikut :

Informan yang bisa memberikan informasi mengenai objek yang di teliti, informan harus memiliki beberapa kriteria, di antaranya :

- a. Cukup lama dan intensif dengan informasi yang akan mereka berikan.
- b. Masih terlibat penuh dengan kegiatan yang diinformasikan.
- c. Mempunyai banyak waktu untuk memberikan informasi.
- d. Tidak mengkondisionalkan atau merekayasa informasi yang akan di berikan.
- e. Siap memberikan informasi dengan ragam pengalamannya.

Informan yang di ambil dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bawaslu : 1 Orang
2. Masyarakat : 15 orang memiliki hak pilih.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal penelitian data sangatlah penting, supaya hasil penelitiannya bisa di pertanggung jawabkan. Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. (Idrus, 2009). Dalam pengumpulan data di dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Interview / wawancara

Wawancara Merupakan proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, Kegiatan, Organisasi, motivasi, dan perasaan yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dengan yang di wawancarai (interview) (Bungin, 2003)

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang di lakukan. (Ayudia, 2016)

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh orang lain. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi adalah sebuah metode yang dapat dipakai untuk historis riset yang ditujukan penguraian dan penjelasan yang telah lalu melalui sumber dokumen. (Surachmad, 2003)

**5. Analisis Data**

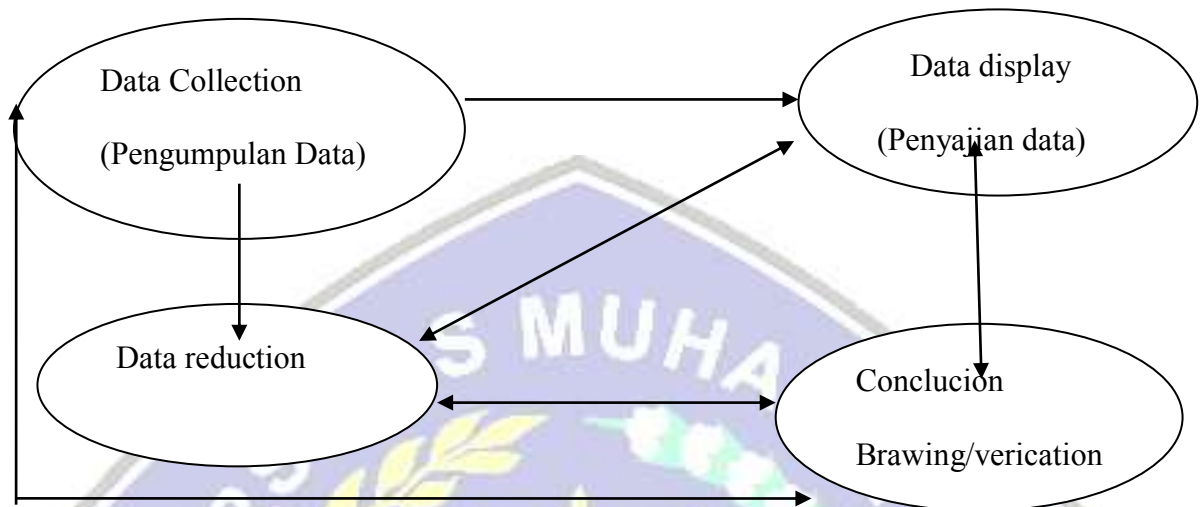
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun temuan penelitian secara sistematis dari hasil wawancara, dokumentasi dan data-data di lapangan. Hasil dari temuan penelitian tersebut dapat di tafsirkan lebih dalam untuk menemukan makna sehingga dapat di tarik kesimpulan sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat di pahami. (Bungin, 2003).

Dari hasil penelitian yang telah di simpulkan secara deskriptif kualitatif, sehingga dapat memberikan penjelasan yang rinci, sistematis dan akurat tentang permasalahan yang telah di angkat dan dirumuskan. Dalam model analisis data Huberman dan Miles mengajukan model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut saling menjalin pada saat, sebelum, selama dan sesudah pembentukan yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut. (Idrus, 2009).

Dari beberapa Analisis tersebut, maka secara ringkas prose situ dapat digambarkan sebagai berikut :

**Bagan 1.1**

**Skema Analisis Data Penelitian Hubberman & Miles**



Sumber diolah dari : (Idrus, 2009)

Dalam model interaktif , tiga jenis kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif dengan sendirinya peneliti harus memiliki kesiapan untuk bergerak aktif diantara empat sumbu kumparan itu selama masa pengumpulan data, dan selanjutnya bergerak ataupun beralih diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan /Verifikasi selama masa penelitian berlangsung, dan tergantung dari penyelesaian tahap-tahap tersebut diatas. Keempat kumparan di atas memiliki keterkaitan yang dinamis, tidak bersifat tetap seperti teori ilmu pasti. Dengan begitu, analisis ini merupakan sebuah proses yang berulang dan berkelanjutan secara terus menerus dan saling menyusul. Kegiatan ini baru akan berhenti saat penulisan bagian akhir penelitian telah selesai dikerjakan. Berikut adalah beberapa tahap dalam menganalisis data antara berikut :Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana diungkap sebelumnya yaitu melakukan Observasi, Wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. (Idrus, 2009)

1. Tahap reduksi data

Tahap Reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang di butuhkan, di buang, Pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analisis. Dengan begitu, proses reduksi data di maksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan di lanjutkan dengan proses verifikasi. (Idrus, 2009)

2. Penyajian data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang di maknai oleh miles dan huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. (Idrus, 2009)

3. Verifikasi Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang di maknai sebagai penarikan arti data yang telah di tampilkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokkan, dan pencarian kasus-kasus negatif (Idrus, 2009).